



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SDM.2-SM.07.02-237
NOMOR : S-194/DL/1/2022

Pada hari ini, JUMAT tanggal EMPAT bulan MARET tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **NUR 'AINUN**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4 Cinere, Depok, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : **MOH. FAZLURRAHMAN**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang berkedudukan di Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

- (1) Peserta Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud Pasal 1, sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada tanggal 7 sampai dengan 11 Maret 2022.

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah :

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam bidang teknik audit dengan alat bantu komputer;
- (2) Menyelenggarakan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :
 - a. Mempersiapkan dan menugaskan peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022;
 - b. Membayar biaya penyelenggaraan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
- b. Menyediakan kurikulum dan modul pembelajaran Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer;
- c. Menyediakan dan menugaskan pengampu/tenaga pengajar Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer;
- d. Melaksanakan evaluasi yang meliputi aspek pembelajaran, penyelenggaraan, dan tenaga pengajar;
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pelatihan yang memadai berupa akses Internet Virtual Zoom dan *Learning Management System* (LMS);
- f. Mengadakan upacara pembukaan dan penutupan pelatihan;
- g. Menerbitkan sertifikat Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta;
- h. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 70.200.000,- (Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) bersumber dari (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor DIPA-013.12.1.108266/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan



Moh. Fazlurrahman
NIP. 198405032006021004

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan



Nur Aihun
NIP. 197611071998032001

Lampiran I
PKS Antara Pusbanglat Tekpim BPSDM Hukum dan
HAM dengan Puslatwas BPKP
Nomor :
Tanggal :

**DAFTAR NAMA PENGAJAR
PELATIHAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
METODE PEMBELAJARAN JARAK JAUH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN/INSTANSI	MATA PELATIHAN
1.	Ika Gunawan, 197605071995021001, Penata (III/c)	Widyaiswara Muda/ Pusdiklatwas BPKP	1. Konsep Dasar TIK dan Peran APIP 2. Manajemen Basis Data
2.	Mustofa Kamal, 197206011993031001, Pembina Tingkat I (IV/b)	Widyaiswara Madya/ Pusdiklatwas BPKP	1. Pengantar Teknik Audit Berbantuan Komputer 2. Simulasi TABK – Pengenalan Microsoft Excel Power Query
3.	Tri Wibowo, 196702071987031001, Pembina Muda (IV/c)	Widyaiswara Madya/ Pusdiklatwas BPKP	Simulasi TABK – Analisis Data dalam Penugasan Audit
4.	Agus Tri Prasetyo, 197108171992021001, Penata (III/c)	Widyaiswara Muda/ Pusdiklatwas BPKP	1. Simulasi TABK – Analisis Data dalam Penugasan Audit 2. Menyusun Simpulan Hasil Audit

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan



Moh. Fazlurrahman
NIP. 198405032006021004

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan



Nur 'Ainun
NIP. 197611071998032001

**DAFTAR NAMA PESERTA PELATIHAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PERIODE 7 S.D. 11 MARET 2022**

No	Nama	NIP	Unit Organisasi
1	Abdul Rokhman, A.Md. S.H.	19801211 200912 1 002	BPSPDM Kementerian Hukum dan HAM
2	Ade Machmud Apriansyah, S.H.	19850420 201503 1 003	BPSPDM Kementerian Hukum dan HAM
3	Ade Rizke Putri Wibowo, S.H.	19960108 201901 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	Adi Priyo Pratomo, S.H., M.H.	19830912 200212 1 002	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5	Agil Fahlefi, S.A.P.	19940724 201712 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6	Agus Priyo Atmoko, A.Md., S.E., M.H.	19810813 200501 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7	Anton Kurniawan, A.Md., S.H.	19830415 200912 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8	Ardiles Ricky Susilo, S.H., M.H.	19810813 200604 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9	Arnanda Arvi Untari, S.E.	19940102 201901 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
10	Bosar Immanuel, S.E.	19860608 201012 1 003	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Dewi Susiana Maulida, S.E.	19891003 201503 2 009	BPSPDM Kementerian Hukum dan HAM
12	Dita Priandini, S.E.	19940616 201901 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
13	Edy Prabowo Saputro, S.Kom., M.Si	19830216 200312 1 002	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14	Efi Handayani, S.H.	19920210 201503 2 001	Inspektorat Jenderal Kemenkumham
15	Erap Nainggolan, S.Sos.	19910706 201712 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16	Galuh Purnomo, S.Sos.	19930426 201712 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
17	Gesang Widiatmoko, S.E.	19950529 201901 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18	Handityo Nugroho, S.E.	19880228 201503 1 002	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
19	Hari Purwanto, A.Md., S.E., M.Si.	19720117 200112 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	Hendra Anggara Saputra, S.E.	19860520 201503 1 003	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
21	Kurniawan, A.Md., S.H.	19840717 200901 1 010	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
22	Mulyani Fitri, S.Ak.	19960821 201901 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Nama	NIP	Unit Organisasi
23	Niken Ayu Kusumaningpuri, S.H., M.H.	19830816 200604 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
24	Nopalisa Egitulas V., S.Kom., M.M.S.I.	19791117 200312 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
25	R. Eri Irawan Sumanto, S.H., M.Kn.	19760321 200604 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
26	Ria Wahyu Tanjung Sasongko	19880729 200912 1 002	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
27	Vito Adriano Wismar, SH	19820918 200801 1 002	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
28	Widya Purnamasari, S.H., M.H.	19710210 200112 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
29	Zein Ihya Ulumuddin	19930503 201712 1 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
30	Zaifachatur Roziyah, S.H., M.Si.	19791226 200501 2 001	Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK KEDUA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengawasan



Moh. Fazlurrahman
NIP. 198405032006021004

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan



Nur Ainun
NIP. 197611071998032001

Lampiran III
PKS Antara Pusbanglat Tekpim BPSDM Hukum
dan HAM dengan Puslatwas BPKP
Nomor :
Tanggal :

JADWAL PELATIHAN TEKNIK AUDIT BERBANTUAN KOMPUTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PERIODE 7 S.D. 11 MARET 2022

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	MATA AJAR	JAMLAT
1	Senin	07 Maret 2022	08:00 - 08:30	Pembukaan	
			08:30 - 12:00	Konsep Dasar TIK dan Peran APIP	5,0
			13:00 - 17:00	Manajemen Basis Data	5,0
2	Selasa	08 Maret 2022	08:00 - 12:00	Pengantar Teknik Audit Berbantuan Komputer	5,0
			13:00 - 17:00	Simulasi TABK - Pengenalan <i>Microsoft Excel Power Query</i>	5,0
3	Rabu	09 Maret 2022	08:00 - 17:00	Simulasi TABK - Analisis Data dalam Penugasan Audit	10,0
4	Kamis	10 Maret 2022	08:00 - 17:00	Simulasi TABK - Analisis Data dalam Penugasan Audit	10,0
5	Jumat	11 Maret 2022	07:30 - 11:30	Simulasi TABK - Analisis Data dalam Penugasan Audit	5,0
			13:00 - 16:30	Menyusun Simpulan Hasil Audit	5,0
			16:30 - 17:00	Penutupan	
TOTAL JAMLAT					50

PIHAK KEDUA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan



PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen
Pusat Pengembangan Pelatihan
Teknis dan Kepemimpinan

